



M EMBANGUN PEMERINTAHAN YANG ARIF MENUJU PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK



Deputi Bidang Pengembangan Peran Masyarakat
Kementerian Lingkungan hidup

2003



Pengantar

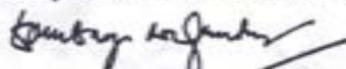
Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan memberikan kontribusi bagi pengelolaan lingkungan yang baik. Untuk mewujukannya memang diperlukan suatu kondisi yang sangat kondusif untuk mendukung proses yang berlangsung. Di mulai dari birokrasi yang bersih dan mempunyai integritas moral yang baik.

Kebijakan politik melalui otonomi daerah juga memberikan peluang semakin besar dalam proses pembangunan berkelanjutan. Melalui otonomi daerah upaya memaksimalkan pelayanan publik menjadi hal yang sangat memungkinkan dan diupayakan secara maksimal. Partisipasi masyarakat harus menjadi pilar utama dalam merumuskan rencana dan arah pembangunan daerah. Karena itu kebijakan publik seharusnya dapat mengakomodir berbagai kepentingan mengingat birokrasi yang telah terpankaskan.

Aspek ekonomi menjadi sangat penting dalam proses pembangunan, asalkan adanya sinergitas antara aspek sosial-budaya dan lingkungan hidup. Terlalu besar biaya dan harga yang harus dibayar apabila pembangunan lebih dikedepankan aspek ekonomi, hilangnya kearifan tradisional dan adat budaya, termasuk kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup akan memberikan dampak negatif lebih banyak dari yang didapat. Untuk itu dituntut perubahan cara berfikir yang lebih logis melalui visi, misi dan strategi yang lebih jelas dalam pembangunan.

Panduan ini diharapkan dapat menambah sedikit wawasan dalam perubahan cara berfikir menuju lingkungan yang lebih baik.

Jakarta, Oktober 2003
Asisten Deputi Urusan
Masyarakat Pesisir dan Laut



Bambang Widyanoro

M

EMBANGUN PEMERINTAHAN YANG ARIF MENUJU PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BAIK



Tahukah kita, penyelenggaraan pemerintah yang baik itu?

Penyelenggaraan pemerintah yang baik, adalah pemerintah memerintah berdasarkan aspirasi dan kehendak masyarakat untuk menjamin kepentingan bersama. Maka diperlukan prasyarat :

Pertama, Pemerintahan yang berjalan harus benar-benar efektif dalam

memerintah. Agar efektif pemerintah harus kuat. Namun kekuatan pemerintah tidak untuk menindas dan mematikan demokrasi yang menjadikan pemerintahan otoriter. Pemerintah yang kuat adalah pemerintahan yang mampu melawan berbagai politik kepentingan sempit yang bermaksud menyelewengkan kekuasaan pemerintah.

Kedua, Pemerintah harus tunduk kepada aturan hukum yang berlaku. Salah satu upaya untuk menjalankan pemerintahan yang baik pemerintah harus patuh terhadap aturan hukum yang berlaku.



Artinya setiap penyelenggaraan pemerintah harus benar-benar menjadi contoh yang baik dalam mematuhi hukum. Dengan demikian ada aturan main yang jelas.

Ketiga, Pemerintah berdiri tegak sebagai wasit dan penjaga aturan hukum untuk menjamin kepentingan bersama. Pemerintah harus memperlakukan orang dan kelompok sama dalam hukum, tidak terjadi diskriminasi.

Keempat, untuk melaksanakan kesemuanya perlu dibentuk perangkat kelembagaan yang demokratis yang berfungsi secara maksimal dan efektif



Pemerintah yang baik diperlukan prasyarat :

- 1) Pemerintahan yang berjalan harus benar-benar efektif;
- 2) Pemerintah harus tunduk kepada aturan hukum;
- 3) Dapat memberikan jaminan kesetaraan hukum para pihak;
- 4) Adanya perangkat kelembagaan yang demokratis.



Bagaimana mewujudkannya?

Untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik diperlukan birokrasi yang bersih

dan mempunyai integritas moral yang baik. Birokrasi yang bersih dan integritas moral yang baik memerlukan :

Pertama, orang-orang yang sejak awal dan terus menerus meningkatkan komitmennya untuk melayani kepentingan publik, kepentingan orang banyak bukan untuk kepentingan pribadi dan golongan.

Kedua, Pemerintah memerintah sesedikit mungkin. Artinya sepanjang pelayanan publik dapat diadakan oleh swasta atau masyarakat pemerintah tidak perlu untuk ikut melakukan

intervensi. Sehingga menjadi sangat penting apabila didelegasikannya pelayanan publik kepada masyarakat dan pasar. Dan fungsi pemerintah adalah menjamin masyarakat dan rakyat untuk memperoleh pelayanan publik secara efektif, efisien dan adil melalui peraturan yang didasari kepentingan akan hal itu.

Menyangkut sistem pemerintahan yang otonomi daerah, dapatkah kondisi tersebut menjadi peluang untuk pemerintahan yang baik?

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan :

- 1) Birokrasi yang bersih; dan
- 2) Integritas moral yang baik.



Tentu saja, sebab desentralisasi dimaksudkan untuk memperluas dan memaksimalkan pelayanan publik guna menjamin kepentingan masyarakat secara lebih baik. Karena mengingat pengambilan kebijakan lebih dekat kepada masyarakat.



Partisipasi masyarakat menjadi lebih terbuka dalam setiap jenjang pengambilan keputusan dan

kebijakan politik, dan memungkinkan kontrol pertanggung serta pertanggung jawaban publik yang lebih baik.

Sehingga peluang untuk menampung aspirasi dan kebendah masyarakat menjadi lebih luas.

Kebijakan publik dapat menjadi lebih baik karena mengakomodasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat lokal. Karena lebih mudah untuk melakukan konsultasi dan komunikasi dengan masyarakat, dan mengetahui secara langsung kondisi sosial kemasyarakatan.

Otonomi daerah juga bertujuan untuk lebih membuka peluang bagi jaminan kesejahteraan dan keadilan ekonomi bagi seluruh rakyat. Hal ini dikarenakan otonomi daerah membuka peluang ekonomi dan akses ekonomi yang memungkinkan setiap daerah dan kelompok

Otonomi daerah merupakan peluang yang sangat besar untuk melakukan re-divinisi dan revitalisasi pembangunan lokal.





sosial untuk berperan aktif dalam pengembangan ekonominya.

Otonomi daerah juga membawa dampak positif berupa pemangkasan rentang birokrasi

dan berarti mengurangi peluang untuk terjadi penyimpangan, karena pelayanan yang semakin dekat dengan rakyat, kontrol yang lebih efektif dari rakyat terhadap kekuasaan birokrasi. Termasuk ekonomi biaya tinggi juga dapat dipangkas dari sistem sebelumnya (sentralisasi).

Apakah ada hubungannya antara penyelenggaraan pemerintahan yang



baik dan pengelolaan lingkungan hidup?

Ada hubungan yang erat antara penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Oleh karena pengelolaan lingkungan hidup yang baik

mencerminkan tingkat penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tanpa



Penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan mempengaruhi dan menentukan pengelolaan lingkungan yang baik

penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sulit mengharapkan akan adanya pengelolaan lingkungan hidup yang baik.

Hal ini, disebabkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik akan menentukan komitmen penyelenggaraan pemerintahan terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Oleh karena itu lingkungan hidup harus menjadi bagian integral dari keseluruhan kebijakan pembangunan, tidak sekedar menjadi aspek pinggiran termasuk perhatian sampingan setelah aspek ekonomi.

Ukuran dari komitmen pemerintah adalah menterjemahkan kepentingan lingkungan hidup dalam berbagai aturan yang menjadi pengganggu dalam menyelenggarakan pemerintahan dan masyarakat. Dan diuraikan dalam kebijakan operasional yang menunjukkan serta mencerminkan tingkat kesadaran

pemerintah mengenai pentingnya pengelolaan lingkungan hidup.

Apakah sistem pemerintahan yang otonomi daerah akan menguntungkan bagi pengelolaan lingkungan hidup?

Secara konseptual, hal ini akan menjadi sangat memungkinkan sebab :

Pertama, otonomi daerah akan mendekatkan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan publik kepada rakyat di daerah, karena hal ini akan sesuai dengan kondisi kenyanayaan yang ada, dalam hal ini



Prinsip dasar otonomi daerah :

- 1) lebih mendekatkan proses pengambilan keputusan;
- 2) Kontrol yang langsung dan lebih cepat;
- 3) Aspirasi masyarakat lebih dapat terakomodir;
- 4) Daerah akan lebih menentukan dalam keberhasilan pembangunan



lingkungan hidup.

Kedua, adanya kontrol yang langsung dan lebih cepat, bahkan murah, dari masyarakat dan berbagai kelompok kepentingan di daerah. Dan hal ini memungkinkan pemerintah mempergunakan kewenangan untuk kepentingan masyarakat.



Ketiga, kepentingan masyarakat lokal yang terkait dengan lingkungan hidup, khususnya masyarakat adat, akan lebih bisa diperhatikan dan diakomodasikan. Karena pengambil kebijakan adalah orang-orang yang mengetahui secara pasti berbagai hal yang menjadi aspirasi masyarakat.

Keempat, keberhasilan pembangunan dan keberlanjutan sangat ditentukan

oleh daerah itu sendiri. Artinya daerah dan masyarakat setempat mempunyai tanggung jawab penuh menyangkut masa depan kehidupan termasuk lingkungan hidup.

Lalu apa sebenarnya pembangunan berkelanjutan itu?

Ada tiga aspek utama dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu ekonomi, sosial budaya dan lingkungan hidup. Ketiga hal ini harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling terkait satu dengan lainnya.

Tujuan utamanya adalah mengeser titik berat pembangunan yang terfokus



Aspek utama pembangunan berkelanjutan :
1) ekonomi,
2) Sosial-budaya,
3) Lingkungan Hidup



terhadap pertumbuhan ekonomi, tetapi mencakup pula sosial budaya dan lingkungan hidup. Sehingga pembangunan

berkelanjutan mengandung pengertian pembangunan yang dapat mengarusutamakan aspek sosial budaya dan lingkungan hidup kedalam aspek ekonomi.

Mengapa demikian?

Kesalahan yang sangat mendasar dalam pelaksanaan pembangunan yang menitik beratkan terhadap pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan kehancuran terhadap sosial budaya dan lingkungan hidup. Kehancuran tersebut menyebabkan negara dan masyarakat membayar sangat mahal, bukan karena hitungan finansial,



tetapi juga bentuk kehancuran kekayaan sosial budaya dan kekayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Akibatnya akan terjadi kemiskinan yang serius mengingat kekayaan sumber daya alam terkuras habis

untuk berbagai kepentingan, dan juga kemerosotan sumber daya alam akan menambah ketidakmampuan untuk meningkatkan kualitas hidup. Tingkat pendidikan yang rendah karena tidak mampu membayar untuk pendidikan yang lebih baik untuk generasi mendatang. Timbulnya berbagai penyakit karena terkait dengan mutu





kehidupan yang semakin menurun. Dan yang sangat dalam sekali akibatnya adalah,

kehancuran sumberdaya alam akan membawa kehancuran terhadap budaya masyarakat sekitarnya yang sangat



tergantung dari sumber daya tersebut. Sehingga akhirnya cara berfikir dan hidupnya dengan segala kekayaan

budaya yang ada juga akan terancam.

Lalu apa yang menjadi pegangan dalam pembangunan berkelanjutan?

Ada tiga prinsip dalam pembangunan berkelanjutan yang dapat dipergunakan :

Pertama, Prinsip Demokrasi. Artinya bahwa pembangunan dilaksanakan merupakan wujud kehendak bersama masyarakat dan demi kepentingan bersama pula. Sehingga aspek yang harus ada di dalamnya adalah : (1) implementasi pembangunan merupakan aspirasi dan kehendak masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah harus dapat menjamin agenda dan kebijakan pembangunan yang dilaksanakan memang benar-benar dari rakyat dan untuk kepentingan bersama rakyat;



(2) adanya partisipasi masyarakat dalam merumuskan dan mengimplementasikan



kebijakan pembangunan; (3) harus ada akses informasi yang jujur dan terbuka menyangkut agenda pembangunan dan proses penyusunannya;

(4) akuntabilitas publik tentang agenda pembangunan, proses perumusan kebijakan dan implementasi pembangunan.

Kedua, Prinsip Keadilan. Artinya bahwa setiap orang dan kelompok masyarakat memperoleh peluang yang sama untuk ikut dalam proses pembangunan dan kegiatan-kegiatan produktif dan menikmati hasilnya. Maka (1) menuntut agar ada perlakuan yang sama bagi semua orang dan kelompok masyarakat dalam proses pembangunan, khususnya

dalam berpartisipasi melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan dan mempunyai akses terhadap peluang dan sumber-sumber



ekonomi, termasuk sumber daya alam; (2) menuntut agar adanya distribusi manfaat dan beban secara proposional setiap orang dan kelompok masyarakat; (3) menuntut adanya peluang yang sama bagi generasi mendatang untuk memperoleh manfaat secara proposional dari sumber daya

- Penegakan Hukum:



- Transparansi;
- Kesetaraan;
- Daya tanggap;
- Wawasan kedepan;
- Akuntabilitas;
- Pengawasan;
- Efisiensi dan efektifitas;
- Profesionalisme.



Partisipasi, mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan

keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Contoh :

- identifikasi dan analisa stakeholder;
- profil lokal;

- konsultasi dan forum;
- partisipasi masyarakat dalam perencanaan strategis, spasial dan program tahunan;
- pembangunan visi dan misi.

Penegakan hukum, mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Contoh :

- Proses konsultasi berdasarkan hukum;

Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di

ekonomi yang ada. Artinya sumber daya yang ada harus dimanfaatkan secara arif, kerusakan atau pencemaran harus



dipulihkan untuk menjamin keberlanjutan: (4) menuntut kerugian akibat proses pembangunan yang dialami masyarakat

atau kelompok masyarakat harus dapat dikompensasikan secara proposional baik oleh negara atau kelompok masyarakat yang menyebabkan hal itu terjadi.

Ketiga, Prinsip Keberlanjutan. Artinya bahwa mengharuskan kita untuk merancang agenda pembangunan dalam dimensi visioner jangka panjang, melihat dampak pembangunan dari sisi positif dan negatif dalam jangka panjang tidak

hanya jangka pendek. Sehingga prinsip ini mengharuskan kita untuk memilih alternatif pembangunan yang lebih hemat sumber daya dan mampu mensinkronisasi aspek konservasi dengan aspek pemanfaatan yang arif. Termasuk di dalamnya hemat dalam pemanfaatan energi, bahan baku dan hemat sumber daya alam.

Lalu bagaimana mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang baik dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik?

Ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk



Pendekatan pengelolaan lingkungan hidup :

1) Good

Governance;

2) Good

management

mencapai hal tersebut, yaitu *good governance* dan *good management* dalam implementasi pemerintahan.

Good governance, meliputi :

Hak partisipasi dalam pengambilan keputusan;

- Penegakan hukum yang tidak memihak;
- Keterbukaan, melalui pengadaan dan akses terhadap informasi;
- Tanggap terhadap semua pelaku;
- Orientasi pada kesepakatan;
- Kesetaraan untuk semua pelaku;
- Akuntabilitas pada pelaku dan publik.

Sedangkan *good management*, meliputi :

- Pengelolaan dengan visi, misi dan strategi;
- Pengelolaan secara inovatif;
- Berorientasi kepada masyarakat;
- Melibatkan seluruh pelaku;
- Mobilisasi berbagai sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan.

Bagaimana untuk mengukur efektivitas hal tersebut?

Ada sepuluh prinsip yang dapat dipergunakan sebagai ukuran terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang baik dan pelaksanaan pemerintahan yang baik, yaitu :

- Partisipasi;

Prinsip *good environmental governance* :

- 1) Partisipasi;
- 2) Penegakan hukum;
- 3) Transparansi;
- 4) Kesetaraan;
- 5) Daya tanggap;
- 6) Wawasan kedepan;
- 7) Akuntabilitas;
- 8) Pengawasan;
- 9) Efisiensi dan efektivitas;
- 10) Profesionalisme.



- Penegakan Hukum:

- Transparansi;
- Kesetaraan;
- Daya tanggap;
- Wawasan kedepan;
- Akuntabilitas;
- Pengawasan;
- Efisiensi dan efektifitas;
- Profesionalisme.



Partisipasi, mendorong setiap warga untuk menggunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan

keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Contoh :

- identifikasi dan analisa stakeholder;
- profil lokal;

- konsultasi dan forum;
- partisipasi masyarakat dalam perencanaan strategis, spasial dan program tahunan;
- pembangunan visi dan misi.

Penegakan hukum, mewujudkan adanya penegakan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Contoh :

- Proses konsultasi berdasarkan hukum;

Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di

dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Contoh :

- proses tender yang transparan;
- pusat informasi;
- media komunikasi.

Kesetaraan, memberikan peluang yang sama bagi setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Contoh :

- akses yang setara untuk membuat keputusan;
- akses yang setara untuk sumber daya;
- akses yang setara untuk dasar pelayanan.

Daya tanggap, meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintahan



terhadap aspirasi masyarakat, tanpa kecuali.

Contoh :

- Radio talk-show;
- Debat publik;
- Komite publik untuk memberikan tanggapan balik.

Wawasan kedepan, membangun daerah berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan warga dalam seluruh proses pembangunan, sehingga warga merasa memiliki dan ikut bertanggung jawab terhadap kemajuan daerahnya.

Pengawasan, meningkatkan upaya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan

mengusahakan keterlibatan swasta dan masyarakat luas.

Contoh :

- pengawasan publik untuk mengontrol berjalannya pemerintahan;

Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas parapengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Contoh :

- partisipasi warga dalam penyusunan budget;
- Double bookkeeping;
- Menentang korupsi dan mempromosikan etikapelayanan yang baik.



Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.

Contoh :

- kantor pelayanan terpadu, satu atap;
- Environmental governance;
- Rasionalisasi organisasi;
- Fit and proper tests;
- Indikator kinerja.

Profesionalisme, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggaraan pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat,

tepat dengan biaya yang terjangkau.
Tingkat institusional : hukum, prosedur, etika;

Tingkat oragnisasi : modernisasi struktur untuk merencanakan dan mengatur aktivitas-aktivitas;

Tingkat pemberdayaan manusia : pembentukan kapasitas sumberdaya manusia.

